

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA
PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PEMBANGUNAN
(Studi; Kampung Tualang, Kabupaten Siak)**

MHD. Rafi Yahya¹; Prima Wahyudi²; M. Fajar Anugerah³; Kenepri⁴

¹Universitas Abdurrah 1

²Universitas Abdurrah 2

³Universitas Abdurrah 3

⁴Universitas Abdurrah 4

e-mail: mhd.rafi.yahya@univrab.ac.id

Received: 2 Desember 2024

Accepted: 5 Desember 2024

Published: 31 Desember 2024

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi kinerja Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam pembangunan Kampung Tualang, Kabupaten Siak. Evaluasi dilakukan untuk memahami sejauh mana PLD berperan dalam mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa merupakan salah satu agenda utama pemerintah dalam upaya pemerataan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh efektivitas program pendampingan, di mana PLD memiliki peran strategis dalam membantu desa menyusun perencanaan, mengelola anggaran, serta meningkatkan kapasitas aparatur desa dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keberhasilan pembangunan desa tidak semata-mata bergantung pada kehadiran Pendamping Lokal Desa (PLD) saja, melainkan merupakan hasil sinergi antara kualitas dan kemampuan individu PLD dengan dukungan sarana pendukung dan komitmen perangkat desa. PLD harus memiliki kompetensi teknis, manajerial, serta kemampuan fasilitasi dan pemberdayaan yang tinggi agar dapat menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan program pembangunan berjalan efektif.

Kata Kunci : Faktor yang Mempengaruhi Kinerja, Pendamping Lokal Desa (PLD), Pembangunan Desa, Kampung Tualang Kabupaten Siak

Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja....

MHD. Rafi Yahya,dkk

Abstract

This study evaluates the performance of the Village Local Facilitator (PLD) in the development of Tualang Village, Siak Regency. The evaluation aims to determine the extent to which PLDs contribute to village development and enhance community welfare. Village development is one of the government's main agendas in achieving equitable national development. The success of village development is largely influenced by the effectiveness of facilitation programs, where PLDs play a strategic role in assisting villages with planning, budget management, and capacity-building for both village officials and community members. This research employed a qualitative approach with a case study design, involving in-depth interviews, direct observation, and document analysis. The findings reveal that village development success is not solely determined by the presence of the PLD; rather, it results from the synergy between PLDs' individual competence, the availability of supporting facilities, and the commitment of village authorities. PLDs must possess strong technical and managerial competencies, as well as facilitation and community empowerment skills, to effectively capture local aspirations and ensure that development programs are successfully implemented.

Keywords: *Factors Influencing Performance, Village Local Facilitator, Village Development, Kampung Tualang, Siak Regency.*

Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja....

MHD. Rafi Yahya,dkk

A. PENDAHULUAN

Era reformasi mendorong peningkatan peran daerah agar dapat membangun dan mengembangkan daerahnya secara mandiri. Negara Republik Indonesia telah membentuk regulasi terkait otonomi daerah yang berfungsi untuk menjelaskan secara ketat dan jelas peran pemerintah pusat, pemerintah daerah serta desa. Konstitusi memberikan kewenangan pada skala pemerintahan masing-masing untuk dapat berjalan secara optimal. Dalam kerangka pembangunan nasional tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kebijakan substansial yang penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, pelayanan dan partisipasi masyarakat.

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah menjadi salah satu kebijakan strategis dalam rangka mendukung pembangunan yang lebih merata dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan lebih besar dalam mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pengelolaan dana desa dan pelaksanaan program pembangunan berbasis partisipasi masyarakat (Hardiyanti & Diamantina, 2022).

Berbicara tentang persoalan pembangunan desa sebagai struktur sosial paling kecil dalam sistem pemerintahan Indonesia, konstitusinya tertuang pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Negara mendorong agar pemerintah Desa yang mengetahui kebutuhan dan berada paling dekat dengan masyarakat, agar mampu membentuk program-program yang meningkatkan partisipasi, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini agar menjadikan pembangunan bertumbuh dari desa-desa diseluruh Indonesia. Ada perubahan pola yang dilakukan oleh pemerintah tentang pembangunan. Semula pembangunan dipusatkan pada satu titik yang kemudian menjadi Kota lalu pembangunan tersebut menyebar ke Desa. Bergeser menjadi pembangunan yang difokuskan pada Desa diseluruh Indonesia yang kemudian nantinya akan mengepung Kota.

Untuk mendorong pembangunan nasional yang didukung partisipasi dan kemandirian masyarakat, maka dibutuhkan struktur pemerintahan yang jujur dan akuntabel. Struktur pemerintahan yang demokratis ini, ditujukan untuk mampu meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat membangun lingkungannya secara mandiri. Karena tidak dapat dipungkiri, masyarakat yang memiliki kemampuan dan kemauan dapat menjadi faktor yang utama dalam pembangunan

Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja....

MHD. Rafi Yahya,dkk

nasional, dan pembangunan nasional dimulai dari masyarakat desa. Pembangunan desa merupakan salah satu fokus utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sejak diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa mendapatkan alokasi dana desa yang signifikan guna mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi desa (Syafingi et al., 2018). Sebagai salah satu bentuk keseriusan dalam hal ini diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Aturan ini menjelaskan tugas dan fungsi kementerian tersebut untuk menjalankan urusan pemerintah dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berbicara tentang pembangunan desa, maka ada beberapa hal penting yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yang pertama tentu saja dana desanya. Dana desa menjadi instrumen penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan desa dan meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan secara lebih mandiri. Pembangunan desa ini akan bergantung pada ketersediaan dana yang dialokasikan pada desa tersebut. Dengan adanya kewenangan yang otonom dalam pengelolaan desa dan juga ketersediaan dana, maka hal ini ternyata mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa (Wahyudi, 2023). Dalam perkembangannya, pola pembangunan desa mengalami perubahan yang semula dari pendekatan top-down menjadi bottom-up. Jika pada masa lalu kebijakan pembangunan desa lebih banyak ditentukan oleh pemerintah pusat, kini desa memiliki kewenangan penuh dalam menentukan prioritas pembangunan mereka sendiri.

Selain Dana Desa elemen penting dalam pelaksanaan pembangunan desa lainnya adalah peran Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Pendamping Desa (PD). Perbedaan antar PLD (Pendamping Lokal Desa) dan PD (Pendamping Desa) ada pada wilayah tugas dan kedudukannya yang mana PLD melaksanakan pendampingan masyarakat desa dengan wilayah tugas dan berkedudukan di desa, sedangkan PD melaksanakan pendampingan masyarakat desa dengan wilayah tugas dan berkedudukan di Kecamatan, selain itu PD melakukan kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak

Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja....

MHD. Rafi Yahya,dkk

ketiga(Dianto, 2018a). PLD bertugas mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. PLD sebenarnya memiliki peran yang penting dalam terwujudnya pembangunan yang baik. Apalagi mengingat kebijakan ini diterapkan di Desa yang diasumsikan memiliki tingkat pendidikan yang tidak sama dengan perkotaan.

Maka dengan adanya semangat pembangunan, PLD ini menjadi penting kehadirannya, pola pembangunan berbasis partisipasi masyarakat semakin diperkuat dengan kehadiran PLD, yang bertugas memberikan asistensi teknis kepada pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan, mengelola anggaran, serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi(Dianto, 2018b). Pembangunan desa yang masih belum optimal merupakan permasalahan yang erat kaitannya dengan peran pendamping lokal yang belum optimal(Arbain & Amberi, 2022).

Tantangan besar dalam efektivitas PLD terletak pada faktor kapasitas sumber daya manusia, dukungan kebijakan, serta koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah(Irawan, 2017). Dampak pendampingan sangat dipengaruhi oleh kemampuan PLD dalam memahami regulasi desa serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat(Zulhakim & Susanti, 2024a). Selain itu, kendala geografis dan minimnya dukungan pelatihan bagi PLD menjadi faktor penghambat yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan desa(Aromatica et al., 2024). Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dan keterlambatan pencairan dana juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan desa(Nur & Fitri, 2019).

Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak masih memerlukan adanya pendampingan secara khusus dari petugas pendamping desa karena hal ini berkaitan dengan tingkat sumber daya manusia yang dimiliki Desa Tualang masih sangat minim, dalam hal ini dibuktikan dengan kurangnya kesadaran masyarakat Desa Tualang untuk ikut berpartisipasi dan antusias dalam mensukseskan program-program pembangunan di Desa Tualang itu sendiri. Pendamping desa diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama dalam membentuk dan merubah pola pikir dan perilaku masyarakat desa agar lebih sadar terhadap pembangunan di desanya sendiri.

Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja....

MHD. Rafi Yahya, dkk

Oleh karenanya keberadaan pendamping desa diharapkan mampu memberi dampak pada kemajuan Desa Tualang untuk lebih maju dan menjadi desa mandiri, karena mengacu pada tugas utama pendamping desa dalam Permendes No. 3 Tahun 2015 adalah mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kinerja yang aktif dan profesional berdampak pada suksesnya sebuah desa. Penelitian ini akan mengungkap faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pendamping local desa dalam pendampingan pembangunan desa secara umum dan secara khusus akan mengungkap bagaimana realita empirisnya di Desa atau Kampung Tualang, Kecamatan Siak.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode ini dianggap cocok untuk mengungkapkan secara mendalam dan dapat memahami secara mendalam di lapangan, dan mengembangkan konsep pada masalah yang dihadapi, serta menerangkan realitas yang berkaitan dengan Faktor yang mempengaruhi Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Pembangunan Kampung Tualang, Kabupaten Siak. Peneliti melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati di lapangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data, deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari informan dan perilaku yang diamati (Sugiyono, 2008). Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dikarenakan peneliti ingin memaparkan (mendeskripsikan) suatu fenomena, mekanisme dan menjelaskan tahapan atau proses mengenai kinerja PLD. Metode penelitian ini digunakan untuk membantu peneliti dalam mengetahui Faktor yang Mempengaruhi Kinerja PLD di Desa Tualang dalam membangun desa. Bentuk penelitian lapangan yang peneliti pakai adalah *field Research*. Yaitu bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan disekitar (Sugiyono, 2012).

Subjek penelitian adalah Penghulu, Pendamping Lokal Desa, dan masyarakat Kampung. Penentuan informan yang akan digunakan dalam penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini

Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja....

MHD. Rafi Yahya,dkk

merupakan teknik untuk mengambil sumber data penelitian dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan tersebut misalnya orang tersebut yang dianggap mengetahui tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai orang yang menguasai terkait penelitian yang dilakukan. Penggunaan *purposive sampling* oleh peneliti digunakan dengan harapan informasi terkait kinerja PLD di Desa Tualang, Kabupaten Siak dapat tepat sasaran. Penelitian ini juga menggunakan teknik *snowball sampling*. Penggunaan teknik ini melakukan pembentukan kelompok sampel yang dimulai dengan satu subjek individu yang merupakan *Stakeholder* di Desa Tualang Siak dan kemudian rantai berlanjut dengan hanya satu rujukan dari satu objek. Pola ini dilanjutkan sampai cukup banyak subjek yang tersedia untuk sampel dan juga karena memperhatikan pertimbangan tertentu yang kemungkinan akan dihadapi saat penelitian. Peneliti menggunakan teknik ini sebagai pengambilan informan dengan cara mengajukan pertanyaan dan rekomendasi kepada objek awal untuk mengetahui objek lain yang dapat diteliti namun masih dalam fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam atau *deep interview*, dan dokumentasi (Koentjaraningrat, 2007). Peneliti menggunakan observasi langsung dengan turun ke lapangan dan melihat langsung fakta yang terjadi di lapangan agar peneliti dapat memperoleh data. Penggunaan observasi ini dilakukan terhadap segala sesuatu yang dapat diamati tentang kinerja PLD. Kemudian melakukan wawancara secara mendalam atau *deep interview* secara mendalam adalah cara yang digunakan yang paling biasa dan nyaman. Harapan dari wawancara mendalam akan mempengaruhi perasaan “kedekatan”, “keakraban” dan kehadiran bersama (*co-presence*) sehingga menghantarkan hasil wawancara yang mendalam. Terakhir dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang sudah ada sebelumnya seperti foto, buku, gambar, catatan literatur, serta hasil penemuan dari penelitian terdahulu (Sugiyono, 2012). Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut konstitusi, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja....

MHD. Rafi Yahya,dkk

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendamping Desa merupakan jabatan di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Desa. Tugas mereka adalah meningkatkan kemandirian masyarakat di desa. Hal ini disebutkan dalam Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Pasal 4-10 menjelaskan bahwa pendampingan Desa dilakukan oleh tenaga pendamping yang terdiri dari Pendamping Desa (PD) di tingkat kecamatan, Pendamping Teknik di tingkat kabupaten, dan Tenaga Ahli di tingkat provinsi atau pusat.

Untuk mendukung tugas Pendamping Desa di tingkat kecamatan, Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan langsung di desa juga diperlukan. Hal ini diatur dalam PP 47 tahun 2015 yang menambahkan Pendamping Lokal Desa sebagai bagian dari tenaga Pendamping Profesional (Pendamping Desa). Sehingga, dapat dimaknai bahwa Pendamping Lokal Desa merupakan pelaksana tugas pemberdayaan di lapangan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat desa. Sedangkan Pendamping Desa, hanya berkedudukan di kecamatan dan bertanggungjawab dalam melakukan koordinasi program pembangunan dan pemberdayaan di desa-desa yang berada di wilayah penugasannya.

Jika kita meninjau dari sudut pandang kelembagaan. PLD bukan Faktor tunggal yang dapat menentukan hasil kinerja pembangunan Desa. Keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh mereka saja. Visi yang jelas dari kepala desa atau perangkat pemerintahan desa serta regulasi yang kompleks juga memberikan pengaruh. Regulasi yang kompleks dan birokrasi yang lambat malah sering menjadi hambatan dalam pembangunan itu sendiri. Belum lagi pada beberapa kasus *trust* yang buruk pada PLD dan kurangnya partisipasi juga memperparah situasi pembangunan desa (Zulhakim & Susanti, 2024b). Dukungan pemerintah desa dan sistem birokrasi yang efisien dapat menentukan lancar atau tidaknya pembangunan desa atau kampung tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun dilapangan ada beberapa hasil yang menjadi faktor dapat mempengaruhi kinerja pendamping lokal desa dalam pendampingan pembangunan kampung tualang kecamatan siak. Adapun beberapa temuan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua faktor agar lebih mudah untuk memahami permasalahan yang ada dilapangan. Berikut kedua faktor yang peneliti temukan yakni;

Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja....

MHD. Rafi Yahya,dkk

1. Kualitas dan Kemampuan Individu

Kualitas dan kemampuna yang dimiliki oleh seorang pendamping lokal desa ternyata menjadi salah faktor utama dalam suksesnya pembangunan desa itu sendiri. PLD harus memiliki kompetensi teknik dan manajerial, kemampuan fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat, integritas dan akuntabilitas, kemampuan beradaptasi dengan segala bentuk kondisi sosial dan budaya setempat.

a. Kompetensi Teknis dan Manajerial

Untuk bisa menjamin keberhasilan pembangunan desa seorang Pendamping Lokal Desa harus memiliki kemampuan kompetensi teknis dan manajerial yang baik. Penting untuk menjaring PLD melalui rekrutmen yang baik dan transparan. Hal ini untuk menghindari hal buruk yang didatangkan dari proses rekrutmen yang tidak baik di masyarakat. Pemahaman yang mendalam tentang regulasi desa, perencanaan pembangunan partisipatif, serta pengelolaan keuangan desa. Tanpa kompetensi ini sulit bagi desa untuk menyusun program yang tepat sasaran dan efektif. Jika PLD belum memiliki kompetensi teknis dan manajerial maka sebaiknya PLD mendapatkan pelatihan dan pengembangan kapasitas yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini ditujukan agar kualitas pendamping desa terus berkembang dan tidak stagnan dan responsif terhadap perubahan-perubahan kebijakan serta tantangan yang terjadi dilapangan.

b. Kemampuan Fasilitasi dan Pemberdayaan.

Hal yang sering kali dihadapi oleh PLD dilapangan adalah upaya mereka untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan kemampuan komunikasi dilapangan pada daerah yang memiliki tingkat partisipasi pemberdayaan masyarakat yang tinggi. Jika PLD tidak memiliki keterampilan komunikasi, fasilitasi, dan pemberdayaan yang baik, maka partisipasi masyarakat bisa menjadi kacau, dan program pemabangunan desa menjadi kurang efektif.

Di Kampung Tualang Siak program pemerintah beberapa kali terhambat atau sama sekali tidak dapat dilaksanakan. Lemahnya upaya memfasilitasi dan kurangnya sinergi antara aparat kampung menyebabkan keterlambatan kegiatan di kampung serta adanya kritikan dari masyarakat terkait transparansi anggaran dari pemerintah desa menjadi penghambat program-program yang ada. Di Desa Tualang Siak, program infrastruktur

Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja....

MHD. Rafi Yahya, dkk

paling sering menjadi polemik. Masalah komunikasi menjadi faktor utama yang sering menjadi lemahnya kemampuan fasilitasi antara pemerintah desa dan masyarakat desa.

Dengan adanya peningkatan kualitas komunikasi antara PLD dan aparat desa kepada masyarakat dapat memaksimalkan kinerja pendampingan dalam menjalankan dan mendampingi program di Kampung.

c. Integritas dan Akuntabilitas.

Pembangunan desa yang berkelanjutan bergantung pada transparansi dan akuntabilitas. Di Kampung Tualang Siak hal ini kerap menjadi isu tersendiri khususnya untuk program pembangunan fisik atau infrastruktur. Masyarakat menganggap setiap pembangunan infrastruktur ini memiliki pendanaan yang besar. Hal ini kerap kali menjadi bola liar dikarenakan kurangnya kemampuan komunikasi untuk menjelaskan hal tersebut menjadi lebih transparan. PLD harus mampu mendorong praktik tata kelola desa yang baik, agar mencegah potensi penyimpangan dana desa, serta memastikan program berjalan sesuai aturan.

d. Kemampuan Beradaptasi

Setiap desa memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda. Maka idealnya perekrutan PLD mesti berasal dari desa atau kampung tersebut. Tidak hanya sampai disitu kemampuan beradaptasi ketika menghadapi polemik yang terjadi di desa atau kampung menjadi perhatian khusus yang mesti dimiliki oleh PLD dalam karakteristiknya. PLD yang berkualitas harus mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi lokal dan memahami dinamika sosial desa agar pendampingan lebih efektif dan diterima oleh masyarakat.

2. Sarana Pendukung

Idealnya, tugas pendamping desa harus menjadi program terpisah dari kegiatan dana desa. Artinya, pendamping desa juga harus melakukan pendampingan terhadap elemen pembentuk desa, yaitu masyarakat. Dalam hal ini, pendampingan masyarakat tidak akan ideal jika pendamping baru mulai bergerak ketika ada pendanaan dari pemerintah desa. Ada kemungkinan lain, yaitu ketika program pendampingan masyarakat tidak didukung oleh pemerintah desa, sehingga dana untuk pemberdayaan masyarakat diabaikan.

Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja....

MHD. Rafi Yahya,dkk

Persoalan yang muncul adalah apakah kerja pendampingan akan berhenti ketika tidak didanai oleh pemerintah desa. Dalam kondisi kerja pendamping desa saat ini, jawabannya mungkin iya karena pendampingan masyarakat tidak memiliki sumber anggaran yang dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat. Bahkan dari sumber primer PLD menjelaskan terhambatnya pelaksanaan pendampingan juga disebabkan oleh minimnya anggaran yang disalurkan.

Alokasi anggaran di desa lebih banyak disalurkan untuk kebutuhan atau program pembangunan yang bersifat fisik. Pembangunan yang bersifat fisik ini, menyerap anggaran yang cukup besar. Sedangkan kegiatan atau program non-fisik yang berorientasi pada pemberdayaan serta peningkatan kapasitas, belum dapat dijalankan dengan maksimal karena minimnya anggaran yang dialokasikan. Tidak adanya kewenangan yang dimiliki oleh PLD untuk mengintervensi menyebabkan program kebijakan bisa saja tidak berjalan tidak tepat sasaran. PLD hanya bersifat asistensi dan rekomendasi agar anggaran yang digunakan oleh perangkat desa berjalan sesuai undang-undang.

Bagi PLD yang mengasistensi kampung lebih dari satu maka akan menemui hambatan tersendiri. Apalagi jika jarak antar kampung berjauhan dan akses jalan yang sulit. Maka sarana akomodasi menjadi kebutuhan khusus yang juga perlu diperhatikan agar tujuan pembangunan dapat terwujud sebagaimana mestinya.

3. Beban tugas PLD yang Terlalu Besar

Seringkali PLD diharapkan menjadi manusia super yang kehadirannya mampu menyelesaikan berbagai permasalahan desa. Baik itu pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan, hingga pengawasan penggunaan dana desa. Namun pada beberapa kenyataan bahwa adanya limit dari PLD ini menjadikan harapan tersebut masih susah untuk diwujudkan. apalagi PLD di Desa Tualang Kecamatan Siak ini mesti mengasistensi empat desa (Kampung Tualang, Tualang Timur, Maredan, Maredan Barat). Hal ini tentu akan mengganggu fokus kerja dari PLD itu sendiri. Apalagi jarak antara kampung tersebut berjauhan serta akses jalan yang sulit. Ekspektasi yang tinggi terhadap PLD harus diturunkan dengan adanya kesadaran dan penguatan dari aspek lain semisal menaikkan *political will* dari perangkat desa untuk membangun desa atau kampungnya sendiri dengan baik.

Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja....

MHD. Rafi Yahya, dkk

KESIMPULAN

Keberhasilan pembangunan desa tidak semata-mata bergantung pada kehadiran Pendamping Lokal Desa (PLD) saja, melainkan merupakan hasil sinergi antara kualitas dan kemampuan individu PLD dengan dukungan sarana pendukung dan komitmen perangkat desa. PLD harus memiliki kompetensi teknis, manajerial, serta kemampuan fasilitasi dan pemberdayaan yang tinggi agar dapat menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan program pembangunan berjalan efektif. Namun, dalam prakteknya, kinerja PLD di Kampung Tualang, Kecamatan Siak, terhambat oleh beberapa faktor, antara lain:

1. **Kualitas Individu**

PLD yang berkualitas harus memiliki integritas, akuntabilitas, dan kemampuan beradaptasi dengan kondisi sosial budaya setempat. Kurangnya kompetensi teknis dan manajerial serta keterampilan komunikasi yang efektif menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dan kurang optimalnya pendampingan dalam implementasi program desa.

2. **Sarana Pendukung dan Beban Tugas**

Pendampingan idealnya didukung oleh anggaran khusus dan fasilitas yang memadai. Namun, alokasi dana desa yang lebih difokuskan pada pembangunan fisik mengakibatkan keterbatasan pendanaan untuk program pemberdayaan non-fisik. Selain itu, PLD yang harus mendampingi beberapa desa sekaligus, terutama ketika jarak antar desa jauh dan akses jalan sulit, menambah beban tugas yang berat sehingga mengurangi efektivitas pendampingan.

Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan peningkatan kualitas PLD melalui pelatihan intensif dan pengembangan kapasitas, serta penataan ulang alokasi anggaran yang mendukung kegiatan pendampingan. Selain itu, sinergi yang lebih kuat antara PLD, perangkat desa, dan masyarakat, didukung oleh kebijakan birokrasi yang efisien, sangat krusial untuk mengoptimalkan hasil pembangunan desa.

SARAN

1. **Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi PLD**

Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja....

MHD. Rafi Yahya,dkk

Penyelenggaraan program pelatihan dan pengembangan kapasitas PLD secara berkala untuk meningkatkan kompetensi teknis, manajerial, dan kemampuan komunikasi menjadi lebih baik lagi. Pelatihan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal sehingga PLD dapat mengadaptasi strategi pendampingan yang efektif dan responsif terhadap dinamika masyarakat desa.

2. **Optimalisasi Dukungan Sarana dan Prasarana**
Pemerintah daerah dan perangkat desa sebaiknya perlu menyediakan sarana pendukung, seperti transportasi dan fasilitas komunikasi, yang memadai untuk memfasilitasi mobilitas PLD antar kampung. Alokasi anggaran khusus untuk kegiatan pendampingan non-fisik juga harus diutamakan agar program pemberdayaan masyarakat dapat dijalankan dengan optimal.
3. **Penguatan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan**
Penguatan koordinasi dan komunikasi antara PLD, kepala desa, dan aparat desa. Pembentukan forum musyawarah rutin yang melibatkan semua pihak dapat membantu menyamakan persepsi dan mempercepat penyelesaian permasalahan. Ini juga dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa.
4. **Penataan Beban Tugas PLD**
Peninjauan dan evaluasi untuk penyesuaian jumlah PLD sesuai dengan kebutuhan di lapangan perlu dilakukan. Idealnya, setiap PLD sebaiknya mendampingi satu desa atau kampung agar fokus dan kualitas pendampingan tidak terganggu. Jika jumlah PLD terbatas, pertimbangkan untuk mengintegrasikan peran pendampingan dengan melibatkan kader masyarakat atau relawan yang sudah dilatih sebagai pendukung kegiatan PLD.
5. **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas**
PLD harus didorong untuk menerapkan mekanisme transparansi dalam pelaksanaan program, terutama terkait pengelolaan anggaran dan penggunaan dana desa. Penggunaan sistem informasi desa yang terintegrasi dapat membantu memantau realisasi program dan meminimalisir potensi penyimpangan, sehingga masyarakat merasa lebih percaya dan terlibat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arbain, T., & Amberi, M. (2022). PERAN PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA BABAI KECAMATAN KARAU KUALA KABUPATEN BARITO SELATAN. *PubBis: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 6(2), 203–213.
- Aromatica, D., Santoso, A., Ningsih, Y., Netti, H., Rela, I. Z., Selly, R. N., Kusnadi, I. H., Madubun, H., Hidayati, S., & Anita, D. (2024). *Membangun desa dengan revolusi digital*. Mega Press Nusantara.
- Dianto, I. (2018a). *Problematika pendamping desa profesional dalam pemberdayaan masyarakat desa di Kota Padangsidempuan*.
- Dianto, I. (2018b). *Problematika pendamping desa profesional dalam pemberdayaan masyarakat desa di Kota Padangsidempuan*.
- Hardiyanti, M., & Diamantina, A. (2022). Urgensi Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 334–352.
- Irawan, N. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat. (2007). *Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia.
- Lestari, R. (2021). Panduan Penulisan Artikel Ilmiah. *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis*.
- Nur, S. W., & Fitri, F. (2019). Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif melalui pengelolaan alokasi dana desa di desa tellumpanuae kabupaten maros. *Jurnal Dedikasi Masyarakat*, 3(1), 1–9.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. In Bandung: Alfabeta.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Syafingi, H. M., Dewi, D. A. S., & Aji, A. B. (2018). Paradigma Aparatur Desa dalam Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Pandecta Research Law Journal*, 13(2), 139–149.
- Wahyudi, J. (2023). Pemerintahan Desa Pasca UU Desa: Mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Inovasi Desa. *Jurnal Reinventing*, 5(1), 1–15.
- Zulhakim, A. A., & Susanti, I. (2024a). Analisis Kinerja Pendampingan Pada Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja....

MHD. Rafi Yahya,dkk

Di Kabupaten Lebong. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(1), 237–250.

Zulhakim, A. A., & Susanti, I. (2024b). Analisis Kinerja Pendampingan Pada Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Lebong. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(1), 237–250.